

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP LAJU INFLASI DI INDONESIA, TAHUN 1970-2013

Endang Setyowati
Algifari

E-mail: fari.algi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of monetary policy and fiscal policy on inflation in Indonesia. Monetary policy is conducted by setting the money supply, while fiscal policy is done through taxes and government spending. The studied period is of 1970-2013 and used autoregressive distributed lag (ARDL) model. The results indicate that money supply has positive impact and significant on inflation in Indonesia. Tax has negative impact, but not significant on inflation in Indonesia. Government spending has positive impact and significant on inflation in Indonesia. This research recommend that to control inflation rate in Indonesia is preferably through money supply and government spending.

Keywords: monetary policy, fiscal policy, inflation, autoregressive distributed lag model

JEL Classification: E52, E62, E63

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi penting bagi suatu perekonomian. Inflasi merupakan gejala ekonomi makro yang menunjukkan kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian pada suatu periode. Laju inflasi yang

tinggi dapat berdampak buruk bagi perekonomian. Laju inflasi yang tinggi dapat menghambat perkembangan investasi, sedangkan investasi sangat dibutuhkan oleh perekonomian dalam rangka meningkatkan kegiatan produksi nasional (menciptakan pertumbuhan ekonomi) dan menciptakan lapangan kerja (menurunkan tingkat pengangguran). Selain berpengaruh negatif terhadap perkembangan investasi, laju inflasi yang tinggi juga akan mendorong distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. (Setyowati, et al., 2013). Dengan demikian, setiap pemerintahan selalu mengusahakan laju inflasi rendah. Laju inflasi rendah pada suatu perekonomian menunjukkan bahwa harga barang dan jasa pada perekonomian tersebut stabil. Stabilitas harga barang dan jasa ini sangat dibutuhkan dalam membangun suatu perekonomian.

Inflasi yang rendah dan stabil sangat dibutuhkan oleh suatu perekonomian dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi yang rendah dan stabil mendorong investasi produktif, lapangan kerja meningkat, dan pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat mampu meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan laju inflasi di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Penyebab inflasi (harga-

harga barang dan jasa dalam perekonomian meningkat) ini dapat berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Inflasi dari sisi permintaan didorong oleh meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dari tahun ke tahun. Sedangkan kenaikan laju inflasi dari sisi penawaran disebabkan oleh meningkatnya harga-harga komoditas strategis seperti harga bahan makanan, harga bahan bakar minyak (BBM), dan melemahnya Rupiah terhadap matauang asing.

Pengendalian laju inflasi di Indonesia merupakan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Dalam upaya mengendalikan laju inflasi, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu menentukan suku bunga (politik diskonto), operasi pasar terbuka (menjual atau membeli surat berharga), dan cadangan wajib minimum bank umum di Bank Indonesia. Instrumen kebijakan Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan laju inflasi ini bertujuan mengendalikan laju inflasi dari sisi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Laju inflasi yang tinggi dapat disebabkan oleh tingginya jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar relatif lebih tinggi daripada nilai barang dan jasa yang ada di pasar, sehingga mendorong harga-harga naik (inflasi). Oleh karena itu, kenaikan harga dapat dikendalikan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Pada kenyataannya, permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian tidak saja berasal dari masyarakat. Pemerintah juga dapat menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa melalui belanja pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian laju inflasi tidak saja dilakukan oleh Bank Indonesia (melalui kebijakan moneter), tetapi juga dilakukan oleh pemerintah (melalui kebijakan fiskal). Dalam upaya mengendalikan laju inflasi di Indonesia, pada tahun 2005 pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI). Tugas TPI adalah 1) melakukan koordinasi dalam rangka penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan; 2) melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang ditempuh; dan 3) melakukan koordinasi dalam rangka merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran inflasi kepada Menteri Keuangan. Untuk memperkuat tim pengendalian inflasi ini, tahun 2008 dibentuk tim pengendalian inflasi di tingkat daerah,

yaitu Tim Pengendalian dan Pemantauan Inflasi Daerah (TPID).

Laju inflasi masih menjadi fokus perhatian pemerintah. Presiden Republik Indonesia pada acara Pembukaan Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 16 Januari 2014 menegaskan bahwa prioritas kerja pemerintahan pada tahun 2014 adalah stabilitas harga (pengendalian laju inflasi) dan penciptaan lapangan kerja baru (penurunan tingkat pengangguran). Laju inflasi dan tingkat pengangguran selalu menjadi perhatian di dalam penyusunan program pemerintahan di negara mana pun. Setiap pemerintahan selalu menginginkan pada masa pemerintahannya dapat dicapai laju inflasi dan tingkat pengangguran yang rendah. Namun secara teoritis hal ini sulit dicapai, karena adanya trade-off antara laju inflasi dan tingkat pengangguran. Artinya, laju inflasi rendah pada masa pengangguran tinggi. Sebaliknya, pada tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tinggi (Mankew, 2007).

Pengelolaan laju inflasi di Indonesia saat ini menggunakan inflation targetting framework. Ciri dari suatu negara yang menerapkan inflation targetting framework adalah mengelola laju inflasi melalui pernyataan resmi dari bank sentral bahwa tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang telah ditentukan, kemudian mengumumkan target inflasi tersebut kepada publik. Pengumuman Bank Indonesia tentang target laju inflasi yang akan dicapai mengandung makna bahwa Bank Indonesia berkomitmen dan memberi jaminan kepada publik bahwa setiap kebijakan yang ditempuh selalu mengacu pada upaya mencapai target laju inflasi yang ditentukan, dan Bank Indonesia akan mempertanggung-jawabkan kebijakannya tersebut apabila target laju inflasi tidak dapat dicapai.

Target laju inflasi di Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah menggunakan laju inflasi yang ditargetkan oleh Bank Indonesia ini dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahun. Walaupun Bank Indonesia setiap tahun telah menentukan target laju inflasi, namun pada kenyataannya seringkali realisasi laju inflasi tidak sama dengan laju inflasi yang ditargetkan. Tahun 2013 yang lalu Bank Indonesia menargetkan laju inflasi pada kisaran 9% sampai dengan 9,8%. Namun realisasi laju inflasi Indonesia pada tahun 2013 hanya sebesar 8,38%. Kesulitan Bank Indonesia mencapai laju inflasi

yang ditargetkan menunjukkan bahwa tidak semua faktor yang dapat mempengaruhi laju inflasi di Indonesia dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya mampu mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi dari sektor moneter, seperti jumlah uang beredar. Faktor-faktor di sektor moneter yang juga dalam berbagai penelitian terbukti berpengaruh terhadap laju inflasi, seperti kurs valuta asing, tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh Bank Indonesia. Karena sistem moneter Indonesia sekarang ini menganut rezim floating exchange rate (sistem nilai tukar mengambang bebas). Kurs valuta asing dibiarkan bebas mengambang ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi di luar sektor moneter, yaitu sektor riil tidak dapat dikontrol oleh Bank Indonesia, seperti belanja pemerintah, produksi dan distribusi barang dan jasa. Tahun 2014, Bank Indonesia membuat target laju inflasi di Indonesia berkisar 4,5% plus minus 1%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap laju inflasi di Indonesia. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia dapat menggunakan berbagai instrumen. Dalam penelitian ini, instrumen pengendalian laju inflasi yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mempengaruhi laju inflasi di Indonesia yang diamati dalam penelitian ini adalah pajak dan belanja pemerintah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Usaha pengendalian laju inflasi selalu dilakukan oleh pemerintah. Pengendalian laju inflasi dilakukan melalui sisi permintaan dan sisi penawaran barang dan jasa. Pengendalian laju inflasi dari sisi permintaan dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengaturan jumlah uang beredar. Ketika laju inflasi tinggi, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan uang ketat. Artinya, Bank Indonesia mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, diharapkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa akan turun dan kenaikan harga-harga (inflasi) dapat dicegah. Beberapa instrumen yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia dalam rangka mengetatkan jumlah uang beredar adalah me-

naikkan tingkat suku bunga, meningkatkan cadangan minimum bank umum di Bank Indonesia, atau menjual surat berharga Bank Indonesia.

Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap laju inflasi. Semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat menyebabkan harga-harga akan semakin tinggi. Hasil penelitian Maulida dan Mayes (2012) tentang pengaruh jumlah uang beredar di masyarakat terhadap laju inflasi di Indonesia periode tahun 1990-2008. Data mengenai jumlah uang beredar adalah jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), terdiri dari uang kartal, uang giral, dan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan. Laju inflasi menggunakan persentase kenaikan indeks harga konsumen Indonesia. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi ordinary least square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia. Sutawijaya (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap laju inflasi di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan data tahun 1985 – 2005 dan dengan model regresi OLS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia.

Kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) dapat pula terjadi akibat dari menurunnya penawaran terhadap barang dan jasa. Penurunan penawaran barang dan jasa dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca yang menyebabkan kegagalan panen, nilai rupiah mengalami depresiasi yang menyebabkan harga barang yang berasal dari luar negeri naik, kenaikan pajak, gangguan distribusi barang akibat bencana alam, dan lain-lain. Pemerintah memiliki berbagai instrumen kebijakan dalam rangka mengendalikan harga-harga. Pajak merupakan instrumen pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik terhadap orang pribadi maupun badan, digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat melalui

dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap orang pribadi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini akan berakibat menurunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Penurunan permintaan terhadap barang dan jasa oleh masyarakat ini menyebabkan harga barang dan jasa turun. Di sisi lain, pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada badan (perusahaan) dapat menurunkan penawaran. Perusahaan menganggap pungutan pemerintah (pajak) sebagai biaya tambahan dalam menyediakan barang dan jasa di pasar. Akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Penurunan penawaran barang dan jasa di pasar akan menaikkan harga barang dan jasa (inflasi).

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang lain adalah belanja pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif, yaitu menurunkan pajak atau meningkatkan belanja pemerintah akan berdampak menaikkan laju inflasi. Penelitian Rother (2004) dengan menggunakan panel data 15 negara industri menyimpulkan bahwa volatilitas kebijakan fiskal secara signifikan mempengaruhi volatilitas inflasi dengan tanda positif. Hal tersebut berarti bahwa perubahan kebijakan fiskal antara periode berjalan (t) dan periode sebelumnya ($t-1$) meningkatkan volatilitas inflasi pada periode berjalan (t).

Laju inflasi dapat ditentukan menggunakan beberapa macam ukuran, yaitu indeks harga konsumen (customer price index), indeks harga perdagangan besar (wholesale price index), dan Deflator Produk Domestik Bruto (GDP Deflator). Laju inflasi yang ditentukan menggunakan indeks harga konsumen dengan menghitung persentase perubahan indeks harga konsumen pada periode yang akan ditentukan laju inflasinya, misalnya inflasi bulanan, tahunan, dan lain-lain. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan pergerakan harga dari paket (keranjang) barang dan jasa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Laju inflasi yang ditentukan menggunakan indeks harga perdagangan besar (wholesale price index) adalah dengan menghitung perubahan harga-harga barang yang ditransaksikan oleh penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar. Laju inflasi yang ditentukan dengan Deflator Produk Do-

mestik Bruto (GDP Deflator) adalah menggunakan perkembangan harga-harga pada tingkat harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga berlaku (PDB nominal) dengan PDB atas dasar harga konstan (PDB riil). PDB nominal adalah produksi domestik bruto yang dihitung menggunakan harga berlaku, sedangkan PDB riil adalah produksi domestik bruto yang dihitung menggunakan harga konstan.

Teori ekonomi makro membagi perspektif tentang penyebab inflasi ke dalam tiga teori, yaitu teori kuantitas uang (teori Klasik), teori Keynes, dan teori Strukturalis. Teori kuantitas uang menjelaskan pengaruh jumlah uang beredar di masyarakat terhadap laju inflasi. Kenaikan jumlah uang beredar akan berdampak pada kenaikan harga-harga (inflasi). Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah uang yang beredar di masyarakat berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia.

Teori ini banyak didukung oleh hasil penelitian empiris. Hasil penelitian Maulida dan Mayes (2012) tentang pengaruh jumlah uang beredar di masyarakat terhadap laju inflasi di Indonesia periode tahun 1990-2008 dan hasil penelitian Sutawijaya (2012) menggunakan data tahun 1985 – 2005 memperoleh bukti empiris bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia. Penelitian Hamzah dan Sofilda (2006) tentang pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 1990-2005 menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM) memperoleh bukti empiris bahwa dalam jangka panjang jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia.

Teori Keynes menjelaskan penyebab kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian adalah akibat adanya kesenjangan antara permintaan (total pengeluaran) masyarakat terhadap barang dan jasa dengan kemampuan perekonomian menyediakan barang dan jasa dalam perekonomian (produksi nasional full-employment/YFE). Jika pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa dalam perekonomian melebihi kapasitas penuh (full-employment) produksi nasional, maka dalam perekonomian terjadi kesenjangan

gan inflasi (harga-harga cenderung naik). Teori Keynes menjelaskan pengaruh pajak dan belanja pemerintah terhadap laju inflasi. Jika pajak dinaikkan, maka inflasi menurun. Sebaliknya, penurunan pajak akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi. Berdasarkan teori ini rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pajak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia.

Kenaikan pajak tidak selamanya akan menurunkan laju inflasi. Kenaikan pajak bagi perusahaan dianggap sebagai tambahan biaya yang beban pajak tersebut oleh perusahaan dialihkan kepada konsumen dengan menaikkan harga. Kenaikan harga-harga akan mendorong inflasi. Dengan demikian kenaikan pajak pada tingkat tertentu dapat menimbulkan kesenjangan inflasi dalam perekonomian. Teori Keynes menjelaskan hubungan pengaruh antara belanja pemerintah dengan laju inflasi. Kenaikan belanja pemerintah dapat meningkatkan laju inflasi dan sebaliknya, penurunan belanja pemerintah dapat menurunkan laju inflasi. Berdasarkan uraian teori Keynes maka dirumuskan hipotesis pada penelitian sebagai berikut:

H3: Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian Rother (2004) menggunakan data 15 negara industri berhasil memperoleh bukti empiris bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif berpengaruh terhadap laju inflasi. Musa et. al. (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap laju inflasi di Nigeria menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Instrumen kebijakan moneter yang dipilih adalah jumlah uang beredar dan instrumen kebijakan fiskal adalah belanja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap laju inflasi. Penelitian Hamzah dan Sofilda (2006) tentang pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 1990-2005 menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM) memperoleh bukti empiris bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia.

Teori Strukturalis menjelaskan terjadinya inflasi disebabkan oleh kekakuan pada struktur ekonomi, teru-

tama di negara-negara sedang berkembang. Struktur ekonomi di negara-negara sedang berkembang pada umumnya terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penawaran barang dan jasa dan pertumbuhan permintaan barang dan jasa, terutama permintaan dan penawaran bahan makanan. Akibatnya harga-harga bahan makanan meningkat. Kenaikan harga-harga bahan makanan ini akan mendorong peningkatan harga-harga barang lainnya dan harga jasa dalam perekonomian, sehingga terjadi inflasi.

Struktur ekonomi di negara sedang berkembang juga ditandai dengan lambannya ekspor dibandingkan dengan perkembangan impor untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan devisa yang dibutuhkan untuk membiayai impor. Kelangkaan devisa ini mengakibatkan nilai matauang dalam negeri mengalami depresiasi. Harga-harga barang impor yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa di dalam negeri menjadi lebih mahal. Kenaikan harga barang dan jasa impor menyebabkan biaya produksi di dalam negeri mengalami peningkatan dan sebagai kompensasi dari kenaikan biaya produksi ini biasanya perusahaan akan menaikkan harga jual barang dan jasa yang diproduksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang berbasis bahan baku impor akan mendorong harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian mengalami kenaikan (terjadi inflasi).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah uang beredar, pajak, dan belanja pemerintah terhadap laju inflasi di Indonesia dalam periode tahun 1970 – 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah uang beredar, pajak, belanja pemerintah, dan laju inflasi Indonesia tahun 1970 – 2013 yang diperoleh dari Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Nota Keuangan dan PAPPB) Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan, dan Laporan Bank Indonesia.

Variabel jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 1970-2013. Variabel pajak adalah penerimaan negara yang berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak

Perdagangan Internasional tahun 1970-2013. Variabel belanja pemerintah adalah Belanja Pemerintah Pusat dan Dana yang dialokasikan ke Daerah. Data tentang belanja pemerintah sebelum otonomi daerah menggunakan pengeluaran total pemerintah, terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Data tentang belanja pemerintah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1970-2013. Variabel laju inflasi diperoleh dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen Indonesia (IHK).

Pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dalam data runtut waktu (time series) tidak selalu terjadi pada periode yang sama. Suatu variabel dapat saja berpengaruh terhadap variabel lain pada periode berikutnya. Misalnya, investasi pemerintah untuk infrastruktur ekonomi (membuat pelabuhan, jalan, terminal, pembangkit tenaga listrik) akan berdampak terhadap peningkatan produksi nasional pada beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan model yang memungkinkan dilakukan analisis pengaruh variabel yang memerlukan tenggang waktu/kelambanan (time lag). Salah satu model regresi yang memungkinkan dilakukan analisis pengaruh variabel terhadap variabel lain yang memerlukan tenggang waktu adalah model penyesuaian parsial (partial adjustment model). Partial Adjustment Model (PAM) atau Stock Model merupakan rasionalisasi model Koyck yang dikembangkan oleh Mark Nerlove pada tahun 1958. Model Koyck merupakan metode sederhana yang digunakan dalam mengestimasi hubungan variabel dependen dengan variabel independen yang dalam persamaannya mengakomodasi variabel teng-

gang waktu/kelambanan (Gujarati, 2003). Alasan lain penggunaan partial adjustment model (PAM) dalam penelitian ini adalah dengan memasukkan variabel kelambanan ke dalam model regresi estimasi berarti tidak perlu lagi melakukan pengujian terhadap stasioneritas data. Dalam penelitian ini partial adjustment model (PAM) diestimasi dengan model autoregressive distributed lag (ARDL) sebagai berikut:

$$INF_t = \beta_0 + \beta_1 JUB_t + \beta_2 PJK_t + \beta_3 BP_t + \beta_4 JUB_{t-1} + \beta_5 PJK_{t-1} + \beta_6 BP_{t-1} + \beta_7 INF_{t-1} + vt$$

HASIL PENELITIAN

Data penelitian diolah menggunakan komputer dengan program statistik SPSS. Tabel 1 berikut ini berisi nilai statistik yang digunakan untuk membuat persamaan regresi estimasi dan menguji pengaruh jumlah uang beredar, pajak, dan belanja pemerintah terhadap variabel dependen laju inflasi di Indonesia.

Hasil perhitungan terhadap data penelitian dapat disusun persamaan regresi estimasi jangka pendek (short-run) sebagai berikut:

$$INF_t = 2,098 + 14,957JUB_t - 1,031PJK_t + 2,091BP_t - 16,863JUB_{t-1} + 2,433PJK_{t-1} - 1,611BP_{t-1} + 0,3502INF_{t-1}$$

Pengujian terhadap hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat (JUB) berpengaruh positif terhadap laju inflasi (INF) di Indonesia menggunakan uji t. Koefisien

Tabel 1
Nilai Statistik Hasil Perhitungan Data Penelitian

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 2,0977 | 11,6044 | 0,1808 | 0,8576 |
| JUB | 14,9567 | 19,3167 | 0,7743 | 0,4440 |
| PJK | -1,0308 | 1,8150 | -0,5679 | 0,5737 |
| BP | 2,0907 | 0,7809 | 2,6773 | 0,0112 |
| JUB(-1) | -16,8625 | 18,6770 | -0,9029 | 0,3728 |
| PJK(-1) | 2,4333 | 1,8925 | 1,2858 | 0,2070 |
| BP(-1) | -1,6113 | 0,7789 | -2,0686 | 0,0460 |
| INF(-1) | 0,3502 | 0,1711 | 2,0471 | 0,0482 |

Sumber: Data diolah.

regresi jumlah uang beredar pada tahun t bertanda positif (14,9567) dengan nilai hitung $t = 0,7743$ dan nilai probabilitas 0,444. Dengan pengujian satu sisi, maka nilai probabilitasnya adalah $0,5 * 0,444 = 0,222$. Jika pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka nilai probabilitas lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, pengujian terhadap koefisien regresi jumlah uang beredar di masyarakat (JUB) menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar di masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap laju inflasi. Pengujian menggunakan nilai hitung t dan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa nilai hitung $t = 0,7743$ lebih kecil daripada nilai kritis $t = 1,645$. Hasil pengujian ini juga menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar di masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap laju inflasi.

Pengujian terhadap hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pajak (PJK) berpengaruh negatif terhadap laju inflasi (INF) dilakukan menggunakan uji t . Koefisien regresi estimasi untuk variabel pajak (PJK) pada tahun t bertanda negatif (1,0308) dengan nilai hitung $t = 0,5679$ dan nilai probabilitas 0,5737. Dengan tingkat signifikansi 5%, nilai probabilitas koefisien regresi estimasi lebih besar daripada 5%. Pengujian terhadap koefisien regresi pajak (PJK) memutuskan menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi. Pengujian menggunakan nilai hitung t dan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa nilai hitung $t = 0,5679$ absolut (0,5679) lebih kecil daripada nilai kritis $t = 1,645$. Keputusan pengujian ini juga menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi.

Pengujian terhadap hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah (BP) berpengaruh positif terhadap laju inflasi (INF) di Indonesia dilakukan menggunakan uji t dan dapat juga dengan menggunakan nilai probabilitasnya. Koefisien regresi belanja pemerintah (BP) pada tahun t bertanda positif (2,0907) dengan nilai hitung $t = 2,6773$ dan nilai probabilitas 0,0112. Pengujian menggunakan nilai hitung t dilakukan dengan dibandingkan antara nilai hitung t dengan nilai kritis t pada tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian. Jika pengujian ini

menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka nilai kritis $t = 1,645$. Nilai hitung t koefisien regresi belanja pemerintah sebesar 2,6773 lebih besar daripada nilai kritis t pada tingkat signifikansi 5% yaitu 1,645. Hasil pengujian ini menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap laju inflasi.

Pengujian terhadap koefisien regresi untuk hipotesis pengaruh positif belanja pemerintah dapat juga dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas t hitung dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini. Misalnya pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka nilai probabilitas t hitung sebesar 0,0113 lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5%. Pengujian terhadap koefisien regresi belanja pemerintah (BP) menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap laju inflasi.

PEMBAHASAN

Pengujian terhadap hipotesis pertama menggunakan tingkat signifikansi 5% menerima hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar tidak berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia. Namun demikian, koefisien regresi estimasi variabel jumlah uang beredar pada tahun t (JUB t) bertanda positif. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan bukti empiris bahwa jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia, namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa jika kecepatan perputaran uang di masyarakat dan volume produksi barang dan jasa dalam perekonomian tidak berubah, maka kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat akan mendorong laju inflasi ke tingkat yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan bukti empiris yang ditemukan oleh Maulida dan Mayes (2012) dan Sutawijaya (2012).

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua memutuskan menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia pada tingkat signifikansi 5%. Namun nilai koefisien regresi estimasi untuk variabel pajak bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pajak

berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia, namun tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh bukti empiris bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi, namun tidak signifikan. Richardian equivalence hypothesis menyatakan bahwa kebijakan pajak oleh pemerintah tidak banyak berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Penurunan pajak oleh pemerintah tidak seketika direspon oleh masyarakat dengan meningkatkan konsumsi. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat tentang penurunan pungutan pajak pemerintah saat ini akan berdampak pada defisit anggaran pemerintah. Untuk menutupi defisit anggaran pemerintah tersebut, pada masa yang akan datang pemerintah akan melakukan pemungutan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tidak akan merespon penurunan pungutan pajak pemerintah saat ini dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. Berdasarkan Richardian equivalence hypothesis ini kebijakan pajak pemerintah tidak berdampak banyak (tidak signifikan) pada laju inflasi.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia. Pengujian terhadap hipotesis ketiga menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap laju inflasi pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Musa et. al. (2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap laju inflasi di Indonesia. Kebijakan moneter dilakukan melalui pengaturan terhadap jumlah uang beredar di masyarakat oleh Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan melalui pajak dan belanja pemerintah oleh pemerintah pusat.

Penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa jumlah uang beredar di masyarakat berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia pada periode yang sama. Pengaruh positif jumlah uang beredar di ma-

asyarakat terhadap laju inflasi pada periode yang sama dapat dilihat dari koefisien regresi variabel jumlah uang beredar di masyarakat (JUB) dalam persamaan regresi estimasi yang bertanda positif. Pengaruh positif jumlah uang beredar di masyarakat terhadap laju inflasi di Indonesia mengandung makna bahwa semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka laju inflasi juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka laju inflasi semakin rendah. Pengaruh positif jumlah uang beredar terhadap laju inflasi secara statistik tidak signifikan. Pajak berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia pada periode yang sama, namun pengaruh pajak terhadap laju inflasi di Indonesia tidak signifikan. Pengaruh negatif pajak terhadap laju inflasi di Indonesia dapat dilihat dari koefisien variabel pajak dalam model regresi estimasi yang bertanda negatif. Pengaruh negatif pajak terhadap laju inflasi di Indonesia mengandung makna bahwa jika pajak naik, maka laju inflasi di Indonesia turun. Sebaliknya, pajak rendah berakibat laju inflasi tinggi. Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia pada periode yang sama. Pengaruh positif belanja pemerintah terhadap laju inflasi di Indonesia dapat dilihat dari koefisien regresi variabel belanja pemerintah pada persamaan regresi estimasi yang bertanda positif. Pengaruh positif belanja pemerintah terhadap laju inflasi di Indonesia dapat dilihat dari koefisien regresi variabel belanja pemerintah dalam persamaan regresi estimasi yang bertanda positif. Pengaruh positif belanja pemerintah terhadap laju inflasi di Indonesia mengandung makna bahwa semakin besar belanja pemerintah akan berdampak tingginya laju inflasi di Indonesia. sebaliknya, semakin kecil belanja pemerintah menyebabkan laju inflasi rendah.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi laju inflasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian laju inflasi di Indonesia efektif dilakukan melalui kebijakan moneter berupa pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika pemerintah (Bank Indonesia) ingin menurunkan laju inflasi, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat dikurangi. Pengendalian laju inflasi

di Indonesia juga dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah. Jika pemerintah menginginkan laju inflasi di Indonesia turun, pemerintah harus mengurangi belanja pemerintah. Pengendalian laju inflasi di Indonesia menggunakan instrumen pajak tidak efektif, karena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat disempurnakan pada penelitian yang akan datang dengan menambahkan variabel independen berupa cadangan devisa, kurs valuta asing, nilai ekspor, dan nilai impor yang mewakili faktor eksternal yang juga secara teoritis dan beberapa hasil penelitian empiris menyatakan berpengaruh terhadap laju inflasi di suatu negara. Penelitian yang akan datang dapat pula menggunakan model penelitian yang mampu mengidentifikasi terjadinya shock dalam perekonomian Indonesia pada tahun 1998 dan tahun 2008 akibat dari krisis moneter. Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami shock akibat dari krisis moneter berakibat data ekonomi makro Indonesia menjadi tidak stasioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Indonesia 1970 – 2013.
- Bank Indonesia. 2013. Laporan Tahunan Bank Indonesia.
- Gujarati, D. and Porter c. Dawn. 2009. Basic Econometrics. Fifth Edition. Mc.Grow-Hill, New York.
- Hamzah, MZ, and Solfidah, E. 2006. “Effect of Amount of Money Outstanding, Government Spending and the Exchange Rate on Inflation Indonesia: Approach Error Correction Model (ECM)”. *Journal Economic Policy*, 2(1): 21-35.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Nota Keuangan dan RAPBN 1970 – 2013.
- Mankew, N. Gregory. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Worth Publishers. New York.
- Maulida, Y., & Mayes, A. 2011. “Pengaruh Defisit Anggaran, Jumlah Uang Beredar Dan Independensi Bank Indonesia Terhadap Inflasi”. *Jurnal Ekonomi*, 19(1).
- Musa, Yakubu, Barfour K. Asare, Shehu U. Gulumbe. 2013. “Effect of Monetary-Fiscal Policies Interaction on Price and Output Growth in Nigeria”. *CBN Journal of Applied Statistics*, 4(1): 55-74.
- Rother, Philipp C. 2004. “Fiskal Policy and Inflation Volatility”. *European Central Bank Working Paper*, No. 317.
- Setyowati, Endang et al. 2013. *Ekonomi Makro Pengantar*. Edisi 2. BP STIE YKPN Yogyakarta.
- Sutawijaya, Adrian. 2012. “Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi terhadap Laju Inflasi di Indonesia”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2): 85-101.